

BAB III
ETIKA POLITIK UMAT ISLAM
PERSPEKTIF M. AMIEN RAIS

A. Prilaku Politik Umat Islam

Islam yang datang ke Indonesia adalah Islam yang pandai "bermain mata" dengan penguasa-penguasa lokal yang akhirnya mereka hampir semua menjadi pemeluk Islam secara serius atau sekedar untuk legitimasi politik. Terlepas dari kualitas Islam yang disampaikan kepada masyarakat banyak, kita dapat mengatakan bahwa proses Islamisasi yang relatif cepat di Nusantara ini tidak dapat dipisahkan dengan bantuan dan perlindungan yang diberikan penguasa-penguasa lokal terhadap penyebaran Islam. Tanpa bantuan mereka kita tidak dapat membayangkan bahwa Islam akan menjadi agama yang dipeluk oleh hampir 90 % dari rakyat Indonesia, suatu jumlah pengikut yang menduduki peringkat pertama diseluruh dunia Islam.

Menyadari dirinya sebagai agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia, Islam melalui Pemimpin-pemimpinnya dalam sejarah kontemporer Indonesia menyatakan bahwa negara (kekuasaan Politik) umat diperlukan sebagai instrumen untuk menjamin dan melaksanakan ajaran-ajarannya dalam kehidupan kolektif.

Pemimpin-pemimpin Islam Indonesia dari semua golongan menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan juga telah berjuang keras agar pelaksanaan syari'at diakui secara konstitusional, sekaligus pada akhirnya kandas dalam perjalanan. Apa yang kita kenal dengan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 adalah puncak dari perjuangan konstitusional itu. Piagam ini ditandatangani oleh sembilan pemimpin Indonesia atau yang dikenal juga sebagai panitia Sembilan yang diketuai Bung Karno. Piagam ini adalah sebuah kompromi politis-ideologis antara golongan yang beraspirasi Islam dan kelompok nasionalis yang sebagian besar juga menganut agama Islam, tetapi menolak ide negara berdasar Islam. Piagam ini hanya berumur 57 hari, sampai tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu diktum pelaksanaan bangsa. Sebagai imbangannya sila pertama Pancasila yang semula berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan formula: Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai simbol tauhid dalam sistem iman umat Islam. dengan perubahan ini, sebenarnya pihak Islam tidaklah terlalu dikalahkan, sebab atribut Yang Maha Esa dalam UUD 1945 juga menjiwai seluruh pembukaan dan batang tubuh konstitusi kita.

Hanyalah golongan yang tidak jujur terhadap sejarah saja yang mungkin mengingkari konsensus politik

yang penting ini. Oleh sebab itu, perkataan epistemologis dan historis yang kritis terhadap kajian Pancasila sebagai sumber hukum perlu dilakukan sejujur mungkin pada masa-masa yang akan datang. Pendekatan a-historis terhadap Pancasila hanyalah akan menunda solusi fundamental bagi masalah-masalah kenegaraan kita. Kemudian bagi umat Islam, tuntutan terhadap pelaksanaan ajaran syari'at dalam kehidupan kolektif mereka haruslah dibarengi oleh kerja-kerja intelektual yang bertanggungjawab dalam merumuskan secara segar ajaran-ajaran Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, hingga perumusan itu dapat menyelesaikan dan menjawab masalah-masalah mendasar yang dihadapi umat manusia abad ini dan abad-abad yang akan datang. Tanpa perumusan yang segar ini yang sepenuhnya berangkat dari pandangan dunia Al-Qur'an, tuntutan-tuntutan politik akan pelaksanaan syari'at mungkin hanya akan banyak mengubah jalan sejarah suatu bangsa Muslim. Oleh sebab itu, cita-cita politik Islam memerlukan fondasi religio-intelektual yang solit yang sebegitu jauh belum kita jumpai secara memuaskan dalam literatur Islam Indonesia.³²

³²A. Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, Mizan, Bandung, 1995, hal. 164.

Gagasan-gagasan para tokoh Islam menjadikan Islam dasar negara sebenarnya tidak di lengkapi argumen empiris mengenai "negara Islam" yang dicita-citakan. Dipandang dari sudut ini, sebenarnya yang di perjuangkan oleh tokoh-tokoh Islam dalam BPUPKI dan PPKI bukan realisasi konsep negara Islam tetapi lebih tepat pada adanya jaminan terhadap pelaksanaan syari'at ajaran-ajaran Islam.³³

Untuk melanjutkan sidang BPUPKI, di bentuk PPKI yang terdiri dari atas 15 orang. Dalam PPKI golongan Islam hanya diwakili oleh ki Bagus Hadikusuma dan K.H. Wachid Hasyim. Tuntutan-tuntutan golongan Islam sebelumnya semuanya juga di batalkan. Bahkan sehari setelah proklamasi, tujuh patah kata dalam piagam Jakarta di hapuskan, kata Allah dalam mukaddimah di ganti dengan Tuhan dan kata mukaddimah di ubah menjadi pembukaan.

Beberapa cendikiawan muslim menganggap bahwa diterimanya idiologi negara pancasila dan dihapuskannya tujuh patah kata dalam piagam Jakarta merupakan kekalahan politik Islam, kenyataan pahit ini harus di terima.³⁴

³³Abdul Azis Thaha, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Gema Insan Press, Jakarta, 1996, hal. 155.

³⁴*Ibid.*, hal. 156.

Hingga pada masa revolusi umat Islam mulai memikirkan suatu partai yang dapat menjadi payung bagi semua organisasi Islam pada saat itu. Dan ini berarti pula bahwa konflik ideologis tentang dasar negara belum berakhir. Masalah ini kembali mencuat dalam konstituante hasil pemilu 1955.

Setelah pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah no. X tanggal 3 November 1945, ditandatangani oleh wapres Moh. Hatta, tentang anjuran membentuk partai-partai politik, maka partai-partai politikpun lahir. Dilihat dari segi ideologis, partai-partai tersebut dapat dibedakan atas tiga jenis ; (1) ideologi Islam, yang di wakili Masyumi (lahir 7 November pada tahun 1945), partai Serikat Islam Indonesia atau PSII (keluar dari Masyumi tahun 1947), persatuan tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Nahdlatul Ulama' (keluar dari masyumi pada tahun 1952). (2) ideologi Nasional sekuler diwakili oleh Partai Nasional Indonesia atau PNI. (3) ideologi Marxis sosialis, diwakili oleh partai sosialis (lahir tahun 10 November 1945, Partai Komunis Indonesia atau PKI (lahir 7 November 1945), Partai Buruh Indonesia (tanggal 8 November 1945), Partai Rakyat Sosialis (pimpinan Sutan Syahrir, 20 November 1945) dan Pesindo. Partai-Partai politik lainnya dapat di katagorikan ke dalam maintream ideologis di atas.

Masyumi dibentuk dalam Muktamar Islam Indonesia di gedung madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, tanggal 7-8 November 1945. Dalam Muktamar tersebut di putuskan bahwa Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam di Indonesia dan Masyumilah yang akan memperjuangkan nasib politik umat Islam di Indonesia. Dengan keputusan ini, keberadaan partai politik Islam yang lain tidak diakui.

Susunan Dewan Partai (Majelis Syuro) dan Pengurus Besar Masyumi pertama memperlihatkan bahwa partai ini mencangkup berbagai golongan dalam Islam. dan persatuan umat Islam, kecuali Perti, baik lokal maupun nasional, menjadi anggotanya. Hanya dalam waktu setahun sejak di dirikan, Masyumi sudah mengungguli PNI dan menjadi partai terbesar di Indonesia.

Antara tahun 1945-1949 segala potensi kekuatan sosial politik di Indonesia diabdikan untuk mempertahankan kemerdekaan, setelah belanda membonceng pihak sekutu untuk kembali menjajah Indonesia. Perjuangan Masyumi pada masa revolusi ini hampir total. Mereka menolak segala perundingan dengan belanda karena di pandang menudai perjuangan. Hal ini sesuai dengan aggaran dasar Masyumi dinyatakan bahwa partai baru ini bertujuan menegakkan kedaulatan rakyat Indonesia dan agama Islam, dan melaksanakan ciata-cita Islam dalam

kenegaraan hingga dapat mewujudkan suatu negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan masyarakat yang berdasarkan keadilan menurut ajaran Islam, serta memperkuat dan menyempurnakan undang-undang dasar RI sehingga dapat mewujudkan masyarakat dan negara Islam.³⁵

Peranan masyumi dalam turun naiknya kabinet dalam masa revolusi ini beragam. Kabinet Presidential tidak berlangsung lama setelah dibentuk pada bulan Agustus 1945, sebulan kemudian sistim ini diganti dengan sistim parlementer dengan Kabinet Sjahrir I (dilantik 14 November 1945). Dalam Kabinet Sjahrir I,II,III antara tahun 1945-1947, Masyumi bertindak sebagai oposisi kendatipun beberapa orang anggotanya atas nama pribadi menjadi anggota kabinet tersebut. Kabinet Sjahrir III jatuh karena dampak perjanjian linggarjati yang di tandatangani PM Sjahrir. Berikutnya terbentuk Kabinet Amir Syarifuddin I, dan Masyumi menjadi partai oposisi. Namun, persatuan ummat Islam mulai retak, karena dengan lihai Amir Syarifuddin berhasil membujuk unsur PSII untuk bergabung dalam kabinetnya. Amir Syarifuddin berkeyakinan, tanpa mengikut sertakan golongan Islam, kabinetnya kurang mendapatkan legitimasi. Karena tidak berhasil mengadakan kesepakatan dengan Masyumi mengenai

³⁵Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UI-Press, Jakarta, 1990, hal. 190.

komposisi kabinet, ia membujuk PSII untuk ikut serta. Pukulan telak diterima oleh Masyumi ketika PSII menarik diri dari Masyumi dan berdiri sendiri partai politik.

Dalam kabinet Amir Syarifuddin II, Masyumi bersedia ikut serta dengan maksud mempengaruhi PM. Amir Syarifuddin dalam perundingan-perundingan dengan pihak Belanda. Namun usaha itu gagal dengan disepakatinya Perjanjian Renville. Setelah timbul perpecahan internal, PM Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya pada presiden. Berikutnya terbentuk Kabinet Hatta yang merupakan "ekstra kabinet" dan paling lama memerintah pada masa revolusi. Dalam kabinet ini pulalah sejarah mencatat peranan Masyumi (atau paling tidak anggotanya) dalam menyelesaikan revolusi sangat besar, hingga menyerahkan kedaulatan ditandatangani pada tanggal 29 Desember 1949. Dengan demikian, berakhirilah masa revolusi.

Setelah penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949, sejarah politik Indonesia memasuki babak baru dengan diterapkannya sistem demokrasi perlementer dan konstitusi UUD RIS 1949 yang kemudian digantidengan UUDS 1940. Masa tahun 1950-195 ditandai oleh jatuh banggunya partai politik yang berumur rata-rata kurang dari setahun. Setelah NU keluar dari Masyumi. Parpol Islam diwakili oleh Masyumi, NU, PSII, dan Perti. Ciri

lainnya, tidak ada satupun parpol yang menjalin kerjasama, namun pada masa ini hubungannya tidak serasi lagi, bahkan dalam saat-saat tertentu sama sekali putus.

Peranan partai politik Islam dalam kabinet-kabinet pada kurun waktu ini mengalami pasang surut, seiring dengan jatuh-bangunnya kabinet Hatta (1950), Masyumi memperoleh jatah 4 kursi menteri. PSII dan Perti tidak masuk. Dalam kabinet Natsir (1950-1951), yang merupakan kabinet pertama yang dipimpin oleh masyumi, duduk 4 orang dari Masyumi dan 2 dari PSII. Dalam kabinet Sukiman (1951-1952) yang merupakan koalisi Masyumi-PNI, kedua belah pihak memperoleh jatah 5 kursi, sedangkan PSII dan Perti tidak disertakan. Berikutnya, dalam kabinet Wilopo (1952-1953), Masyumi mendapat jatah 4 kusi, termasuk menteri Agama (Pakih Usman dari Muhammadiyah).

Dalam kabinet Ali Sastroamijoyo I (1953-1955) mengikutsertakan wakil NU dan PSII, sedangkan Masyumi tidak ikut. Inilah kabinet pertama dengan NU, atas nama organisasinya, ikut dalam pemerintahan. NU memperoleh jatah 3 kursi dan PSII 2 kursi. Komposisi kabinet ini merupakan pukulan bagi Masyumi karena sebelumnya NU berjanji tidak akan ikut duduk di kabinet. Masyumi menuduh upaya Ali Sastroamijoyo mengikutsertakan PSII

dan NU adalah tindakan memecah belah umat. Untuk pertama kalinya, setelah penyerahan kedaulatan, Masyumi bertindak sebagai oposisi.³⁶

Kabinet Ali I jatuh karena persoalan angkatan Darat, dan diganti kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956) dari Masyumi, dengan tegas khusus menyelenggarakan Pemilu 1955. Dalam kabinet ini Masyumi memperoleh jatah 4 kursi dan merangkul PSII dan NU sehingga untuk pertama kalinya terjalin kerjasama dalam suatu kabinet antara partai-partai politik Islam.

Kabinet Ali Sastroamijoyo II (1956-1957) adalah kabinet yang terbentuk sebagai hasil pemilu 1955. Kabinet ini merupakan koalisi PNI, Masyumi dan NU. Tiga partai tersebut termasuk empat besar "pemenang pemilu 1955 disamping PKI. PKI tidak disertakan dalam kabinet ini karena ditentang oleh Masyumi dan NU. Kabinet ini jatuh karena presiden Soekarno berkeinginan ikut serta dalam kekuasaan pemerintah, padahal secara konstitusional hal ini tidak dibenarkan. Kepala negara hanya simbol dan tidak memiliki kekuasaan eksekutif.

Bung Karno dalam berbagai kesempatan mencela pemerintahan banyak partai. Baginya, sistem parlementer tidak sesuai dengan alam pikiran Indonesia. Oleh karena

³⁶Abul Azis Thoha, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal. 166.

itu, ia harus diganti dengan sistem politik lain, sistem politik yang kemudian dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin. Gagasan Demokrasi Terpimpin antar lain disampaikan Bung Karno Pemuda. Pada bulan Januari 1957, dua kali Bung Karno mencela pemerintahan banyak partai. Pada tanggal 21 Pebruari 1957, dihadapan tokoh-tokoh ibukota, anggota kabinet, pimpinan partai, pimpinan Angkatan Darat, dan Perwira Tinggi, Bung Karano menyampaikan konsepsinya.

Dalam sejarah kontemporer, periode Demokrasi Terpimpinan (1959-1965), sekalipun sangat singkat, telah menggoreskan suatu episode yang sangat berharga bagi kita dalam rangka belajar mencari suatu sistem politik demokrasi yang sehat. Demokrasi Terpimpin adalah sebuah penyimpangan dari sistem demokrasi yang kita anut. sistem demokrasi yang sengaja kiat pilih untuk membangun perpolitikan di negara kita yang belum lama secara konstitusional. Konstitusi-konstitusi yang pernah kita laksanakan: UUD 1945. UUD RIS (Republik Indonesia serikat) tahun 1949, UUDS (Sementara) tahun 1950, dan kemudian keyakinan bahwa demokrasi adalah sistem politik yang tidak boleh ditawarkan lagi, jika Indonesia memang mau tampil sebagai suatu negara modern di permukaan bumi ini. Para pendiri Republik Indonesia pada saat merancang konstitusi-konstitusi kita dalam jangka waktu selama

lima tahun menyadari betul bahwa pilihan terhadap sistem politik demokrasi dengan bentuk pemerintahan Republik telah didukung oleh kekuatan mayoritas mutlak dalam masyarakat Indonesia.

Kecuali Komunis yang percaya kepada ideologi totaliter, golongan-golongan lain di Indonesia, apalagi Islam, sudah sepakat bahwa demokrasi itu adalah satu-satunya pilihan yang sah untuk menciptakan suatu bangunan politik yang kokoh bagi negara kita. Penyimpangan dari jalan demokrasi yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin tidak dapat dipisahkan dari pengaruh budaya politik totaliter yang diperjuangkan oleh golongan komunis di Indonesia.³⁷

Menurut penjelasan resmi pemerintah (Bung Karno), Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi murni yang berdasarkan suatu ideologi yang memimpin dengan menentukan tujuan serta cara mencapainya. Demokrasi Terpimpin Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh ideologi negara yaitu Pancasila dan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk mufakat diantara semua golongan progresif. Inti pengertian di atas terdapat pada kata "demokrasi" dan

³⁷A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 1988, hal. 132.

"terpimpin", dan kata yang bersifat komplementer. "Terpimpin" berarti ada seorang pemimpin yang memimpin dalam rangka demokrasi.

Dalam praktiknya, kata "terpimpin" menggusur kata "demokrasi" dengan bertindaknya Soekarno sebagai seorang diktator. Hampir semua kekuasaan negara; eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada dalam genggamannya. Sutan Takdir Alisyahbana menyamakan Soekarno dengan raja-raja dalam sejarah kuno Indonesia.

"Posisi Soekarno sebagai Presiden dan sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, yang ditangannya terpegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif (hanyalah) berbeda sedikit dengan raja-raja absolut masa lampau, yang mengklaim sebagai inkarnasi Tuhan, atau wakil Tuhan di dunia".

Pemusatan kekuasaan disatu tangan menimbulkan konsekwensi yang berbeda-beda bagi partai politik Islam. Terjadilah kristalisasi NU, PSII, dan Perti diizinkan tetap tampil sebagai wakil kelompok agama dalam Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis), jargon politik Bung Karno dalam rangka menciptakan persatuan bangsa. Sedangkan sayap modernis, Masyumi, yang selalu melancarkan berbagai kritik tajam dianggap sebagai perintang revolusi sehingga tidak dibiarkan eksis. Dalam revolusi, menurut Bung Karno, tarikan antara musuh revolusi dengan teman revolusi harus tegas.

Masyumi seringkali mengalami perlakuan yang tidak wajar dari pemerintah. Pertama kali, pada tanggal 20 Maret 1960, ia dikucilkan dari DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong), sebuah parlemen bentukan Bung Karno untuk menggantikan parlemen hasil pemilu 1955. empat bulan kemudian, partai ini diperintahkan bubar. Salah satu alasannya adalah keterlibatan para pemimpinnya dalam pemberontakan daerah PRRI/Permesta yang menentang pemerintahan Soekarno di Jakarta.

Para tokoh Masyumi pun ditangkap, diantaranya Muhammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, Isa Anshari, Yunan Nasution, Moh. Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Nurhanuddin Harahap, Kasman Singadimedjo, dan Yusuf Wibisono. Bersama mereka ikut ditahan juga, Hamka, Assaat, dan KH. EZ. Muttaqien.

Setelah Masyumi bubar pada akhir 1960, perpolitikan Islam diwakili sepenuhnya oleh Liga Muslimin dengan NU sebagai pemain utamanya sampai sistem Demokrasi Terpimpin itu sendiri berantakan bersama penciptanya pada akhir tahun 1965 dengan didahului oleh apa yang disebut dengan peristiwa G30S/PKI yang banyak menelan korban itu.

Dua kelompok Partai Islam (Masyumi dan partai bergabung Liga Muslimin, NU, PSII dan Perti) ini, mempunyai sikap berbeda dalam menilai Demokrasi

Terpimpin. Kelompok pertama dapat disebut sebagai pendukung idealisme martir, sedangkan yang kedua adalah pendukung akomodasionisme. Dua sikap ini menurut mereka sama-sama didasarkan atas pertimbangan dan kepentingan agama; perbedaan ijtihad politik dalam menghadapi realitas historis.³⁸

Demokrasi Terpimpin adalah sistem politik tanpa demokrasi seperti yang dikatakan Natsir. menghadapi kenyataan ini partai-partai Islam tampaknya tidak punya pilihan lain kecuali menyesuaikan diri dengan keadaan, demi untuk survival. Bila tidak demikian, maka politik belah bambu Soekarno dapat menghancurkan mereka, seperti yang diderita Masyumi dan PSI. Politik belah bambu adalah politik pilih kasih; sebelah diangkat, sedang sebelahnya lagi diinjak. Yang diangkat adalah mereka yang dapat menyesuaikan diri dengan logika revolusi, sedang yang diinjak adalah mereka yang "tidak pandai" menyesuaikan diri. Pada masa demokrasi Terpimpin, yang pandai menyesuaikan semakin merapatkan diri mereka dengan istana, sedang yang tidak pandai "banyak yang meringkuk dalam penjara dengan segala penderitaannya. Bahkan ada yang meninggal dalam status tahanan, yaitu St. Sjahrir. Pada masa itu, bagi Soekarno, Nasakom

³⁸A. Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, Mizan, Bandung, 1995, hal. 180.

adalah pancaran dari Pancasila dan UUD 1945, seperti yang ia tegaskan dalam pidatonya 17 Agustus 1961.

Budaya politik otoriter yang berkembang pada masa Demokrasi Terpimpin bukanlah semata-mata karena kesalahan Bung Karno. Partai-partai Politik dan ABRI yang menyokong sistem itu juga turut bertanggungjawab karena Bung Karno dibiarkan larut dalam otoriterisme yang membawa malapetaka itu. Kemudian partai-partai Islam yang mencarikan dalil-dalil agama untuk membenarkan kecenderungan otoriter itu dapatlah dikatakan sebagai mempererat agama untuk kepentingan politik jangka pendek. Namun apa yang dikatakan Hatta bahwa demokrasi Terpimpin akan bernasib seperti rumah yang terbuat dari kartu, akhirnya dibenarkan sejarah, tetapi kecenderungan otoriter dalam budaya politik Indonesia belum tentu lenyap sepenuhnya dari panggung sejarah Indonesia kontemporer.³⁹

Keluarnya Surat perintah 11 Maret 1966 merupakan titik awal lahirnya Orde Baru. Pelantikan Jenderal Soeharto menjadi Presiden dalam sidang MPRS bulan Maret 1968 menandai surutnya dua kekuatan politik utama dan demokrasi terpimpin dari panggung politik nasional, yaitu Soekarno dan PKI, dengan meninggalkan ABRI

³⁹ *Ibid.*, hal. 186.

sendiri. Parpol sendiri masih belum dapat berkembang setelah "dilumpuhkan" Rezim Orde Lama. Dalam keadaan demikian, ABRI memiliki *Surplus of Power* untuk berbuat apa saja. Namun demikian, mereka tidak tergoda untuk membentuk pemerintahan junta militer. ABRI lalu mengajak kaum teknokrat menata perekonomian nasional. Dalam bidang politik, pemerintahan Orde Baru diharuskan menciptakan sebuah format politik baru diharuskan menciptakan sebuah format politik baru yang berlainan dengan format politik masa sebelumnya. Format politik apakah itu bagaimana ciri-ciri serta proses pembentukannya.

Sementara itu, dilain pihak, penetrasi pemerintah ke dalam kehidupan sosial masyarakat, membuat umat Islam bersiap diri. Mereka harus menentukan sikap, apakah hanya menjadi penonton atautkah turut bermain. Sehubungan dengan hal itu, perlu dilihat keberadaan lembaga-lembaga politik Islam yang berfungsi sebagai artikulator kepentingan umat Islam.

Persoalan utama yang menghadang utama yang menghadang rezim yang baru adalah warisan krisis rezim sebelumnya. Ada dua macam krisis, di dalam bidang ekonomi, terjadi kemrosotan dan stagnasi. Pada tahun 1966 bahkan laju inflasi mencapai 650%. Sementara itu, dibidang politik terjadi ketidak stabilan karena

pertentangan antar kelompok-kelompok politik dalam masyarakat.

Untuk mengatasi dua krisis ini, pemerintahan mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi berupa pembangunan ekonomi yang berorientasi keluar. Sedang dalam bidang politik, diupayakan menciptakan format politik yang mendukung pembangunan ekonomi.⁴⁰

Dalam periode *awal konsolidasi* pemerintahan Orde Baru timbul optimistis dikalangan Islam pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya akan kehidupan demokratis karena romantisme perjuangan menumbangkan Orde Lama penuh dengan retorika demokrasi. Di kalangan Islam sendiri timbul harapan untuk kembali memainkan peranannya seperti seperti pada masa demokrasi perlementer. Akan tetapi, dalam realitanya, keinginan ini bertubrukan dengan strategi pembangunan Orde Baru, yaitu marginalisasi peranan partai politik dan menabukan pembicaraan masalah-masalah ideologis (selain Pancasila), terutama yang bersifat keagamaan.

Sejak itu, hubungan Islam dengan negara bersifat *antagonis*. Hubungan bulan madu sebelumnya sudah dilupakan. Seperti "pengantin baru", setelah bulan madu berlalu, janji-janji yang pernah diikrarkan pun

⁴⁰Abdul Azis Thoha, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal. 186.

dilupakan. Hubungan ini berlangsung sampai dengan masa penerapan asas tunggal, yang bermula pada pidato Presiden Soeharto di depan sidang DPR tanggal 18 Agustus 1982. "ketegangan konseptual" yang tercipta menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk saling memahami posisi masing-masing. Karena itulah, masa ini disebut masa resprokal kritis. Setelah semua ormas dan orsospol mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, hubungan ini berubah ini berubah menjadi akomodatif.

Bagi pemerintah, bukan masanya lagi membicarakan persoalan-persoalan ideologis, peranan partai-partai politik dan lain sebagainya yang bercorak ideologis-politik. Sesuai dengan strategi pembangunan yang menekankan pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan politik semata-mata bertugas sebagai penunjang dengan menciptakan stabilitas politik, maka pemerintahan melakukan marginalisasi peranan agama dalam struktur politik.

Setelah pemerintah Orde Baru memantapkan kekuasaannya, mereka segera melakukan kontrol yang lebih kuat terhadap kekuatan politik Islam terutama kelompok radikal yang dikhawatirkan dapat menandingi kekuatan pemerintah. Kekhawatiran akan semakin menguatkan militansi Islam ini menjadi agenda utama pembicaraan

para elit politik Orde Baru. Trauma masa lalu, "pembangkangan" tokoh-tokoh Islam, dan isu negara Islam menghantui benak para pengambil keputusan.⁴¹

Dalam periode *antagonistik*, belum menunjukkan hubungan yang harmonis karena banyaknya reaksi dan kontradiksi antara kebijakan pemerintah dan umat Islam. Antara lain; gagalnya pembentukan PDII (partai demokrasi Islam Indonesia), gagalnya rehabilitasi Masyumi dan berdirinya Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), disahkannya aliran kepercayaan dalam SU MPR 1973, rancangan Undang-Undang Perkawinan dan legalnya tempat-tempat perjudian.

Sehingga dalam periode *resiprokal-kritis* (1982-1985), hubungan antara Islam dan negara ditandai oleh proses saling mempelajari dan saling memahami posisi masing-masing. Periode ini diawali oleh *Political test* yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyodorkan konsep asas tunggal bagi orsospol dan selanjutnya untuk semua ormas yang ada di Indonesia.

Setelah sosialisasi ide asas tunggal tahun 1982 sampai diundangkannya dalam bentuk lima paket UU Politik tahun 1985, reaksi kalangan Islam beraneka ragam. Bila dipilah-pilah, reaksi tersebut dapat dibedakan antara

⁴¹ *Ibid.*, hal. 243.

yang bersifat pasif-konstitusional dan reaksi ekstrim yang inkonstitusional. Yang pertama diwakili oleh PPP sebagai "partai politik Islam" dan ormas-ormas yang dikenal dengan warna keislaman. Sedangkan yang kedua diwakili oleh kelompok-kelompok individual yang kritis terhadap kebijaksanaan asas tunggal tersebut, dengan klimaks meletusnya peristiwa Tanjung Priok.

Setelah melalui *Political test*, umat Islam dinilai negara "lulus ujian". Umat Islam pun semakin memahmi bahwa kebijakan negara tidak akan menjauhkan mereka dari ajaran Islam (sekularisasi). Maka dimulailah hubungan yang saling berakomodasi.

Penerimaan asas tunggal semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah. Mereka belajar banyak dari pengalaman partai politik Islam sebelumnya yang terpecah belah. Pada umumnya mereka menerima asas pancasila sebagai asas tunggal melalui cara musyawarah mufakat untuk menghindari oknum-oknum pengurus yang menjilat pemerintah sambil menyikut teman seiring. Merekapun berupaya membatasi seminim mungkin campur tangan pemerintah dalam urusan internal organisasi.⁴²

Walaupun demikian, pengendalian birokrasi secara efektif telah menipiskan watak ideologis kehidupan

⁴² *Ibid.*, hal. 199.

penguasa mengontrol, mengendalikan dan mengarahkan dinamika partai tersebut.

Kekalahan politik Islam pada Orde Baru merupakan akibat hilangnya dukungan mayoritas pemeluk Islam dari segmen abangan. Perebutan kekuasaan antara santri dan abangan sejak Orde Baru dapat dikatakan sirna dari percaturan politik ketika elite militer menguasai pemerintahan. Sementara pemegang jabatan strategis birokrasi Orde Baru dapat digolongkan ke dalam kelompok yang dekat dengan segmen abangan yang merupakan basis Golkar terutama masuknya Aliran Kepercayaan dalam GBHN. Dengan demikian tekanan terhadap partai dan politik Islam datang dari dua jurusan. Pertama hilangnya dukungan massa umat, dan kedua dari elite birokrat.⁴³ Kondisi perilaku politik umat Islam di atas menunjukkan betapa banyak yang seharusnya kita perbuat dalam memperbaiki moralitas umat yang belum sampai dalam lingkungan yang benar-benar etika menjadi pegangan hidupnya.

B. Etika Dalam Prespektif M. Amien Rais

1. Implikasi dan peran Etika

Etika (*Ethos*) adalah kata Yunani; yang berarti, watak atau kesusilaan. Istilah etika digunakan untuk

⁴³Abdul Munir Mul Khan, *Runtuhnya Mitos Politis Santri*, SI-Press, Yogyakarta, 1994, hal. 41.

mengkaji sistem nilai yang ada. Karena itu etika merupakan suatu Ilmu.⁴⁴

Dalam konsep yang lain, etika menyangkut nilai dan kriteria untuk membedakan mana tindakan yang terpuji dan mana tindakan yang terkutuk. Korupsi, manipulasi, kickback, komisi, bribery (sogokan) dan lain sebagainya jelas merupakan tindakan yang terkutuk dari segi moral. Hal-hal terkutuk itu tetap hanya memegangi etika. Sebaliknya, mereka yang membelakangi etika pembangunan, hal-hal terkutuk yang merugikan bangsa dan negara dipandang sebagai hal-hal biasa. Dengan enteng dan tanpa rasa berdosa mereka melakukan tindakan-tindakan yang menyerimpung proses pembangunan.

Nurani mereka yang terbiasa melakukan tindakan yang bersifat destruktif terhadap berbagai lembaga negara dan aturan mainnya dapat berlahan-lahan menjadi gelap gulita. seperti sindiran Al-Qur'an, nurani mereka berpenyakit dan Tuhan Allah justru menambah-nambah penyakit itu.

Bila para pelaku pembangunan atau katakanlah kita semua, memegang teguh etika atau moral pembangunan dan memiliki komitmen yang tinggi maka rasanya strategi pembangunan itu akan dapat dilaksanakan dengan baik.

⁴⁴Mahjudin, *Kuliah Akhlak-Tasawuf*, Kalam Mulia, Jakarta, 1991, hal. 7.

sosial umat Islam, sehingga kekuatan ideologis partai-partai dan organisasi sosial Islam (santri) semakin melemah dan tidak berfungsi. Tipisnya watak ideologi Islam tersebut memperlonggar solidaritas primordial antara partai dan pemimpin umat dengan para pendukungnya.

Kekalahan partai Islam tidak saja diakibatkan oleh framentasi pemeluknya, akan tetapi juga diakibatkan semakin tipisnya watak ideologi Islam dan pudarnya sentimen agama dikalangan mereka. Kondisi demikian mempermudah Orde Baru mengendalikan dan mengarahkan kehidupan umat Islam sesuai dengan tujuan-tujuan politiknya.

Strukturisasi ideologi dan kebijaksanaan politik Orde Baru tersebut kemudian diikuti dengan usaha penyerapan tokoh dan pemimpin Islam serta ulama ke dalam kekuasaan birokrasi melalui organisasi-organisasi sosial politik dan organisasi keagamaan di samping partai.

Berdasarkan kondisi partai dan organisasi Islam tersebut Orde Baru menerapkan politik depolitisasi dan departaisasi. Hubungan setruktural massa rakyat dan umat Islam dengan partai menjadi teroutus akibat politik massa-pengambang" dan penyederhanaan partai-partai politik. Pernyataan partai Islam kedalam Partai Persatuan Persatuan Pembangunan (PPP) mempermudah bagi

sebaliknya, bila kita tidak bersedia memegang etika dan moral pembangunan dengan teguh dan tidak sanggup menunjukkan komitmen tinggi, strategi pembangunan itu dapat mengalami kegagalan.⁴⁵

Salah satu segi yang sangat fatal dari manusia moderen adalah manusia modern itu emoh, mengatakan tidak, terhadap norma-norma yang sifatnya abadi, permanen, konstan. Jadi, manusia modern itu pandai sekaligus goblok dan tolol karena manusia-manusia modern itu keminter, tidak mau melindungi segala macam program dan langkah kehidupannya pada sesuatu yang sifatnya sudah mapan, konstan dan permanen, yang sifatnya normatif.

Dalam perbincangan dan diskusi diantara anak-anak muda, kadang-kadang mengatakan, ah ... itu normatif. Padahal itu penting sekali. Tanpa norma itu orang akan kehilangan pijakan dan menjadi tanpa arah. Nah, manusia-manusia intelektual Indonesia kadang-kadang sesungguhnya belum matang betul, dan karena tahu teori-teori ini dan itu, seperti posmo dan lain-lain yang aneh-aneh itu, kemudian ada kecenderungan mereka itu mengemohi, meniadakan, kepada normatif, moral, etika bagi upaya membangun peradaban masa depan.

⁴⁵M. Amien Rais, *Kearifan Dalam Ketegasan (Renungan Indonesia Baru)*, Biograf Publishing, Yogyakarta, 1999, hal. 20.

Sehingga dikenal misalkan kata-kata situational ethics, etika situasional. Akibatnya moral menjadi sangat nisbi atau relatif.⁴⁶ Begitu kita menerima moral situasional atau moral kontekstual, sesungguhnya kita sejak itu, from the very begining, kita sudah menuju ke kebangkrutan kemanusiaan itu jelas sekali.

Kalau kita tidak mau atau menolak norma-norma yang permanen, konstan apalagi yang datang dari wahyu Ilahi, maka manusia menjadi makhluk yang sangat nisbi. Kemudian menjadi serba nisbi pula aturan-aturan moral, hukum dan lain-lain itu. Lantas kita tidak bisa membayangkan yang namanya peradaban itu menjadi amburadul.

Ada pegangan pokok dan mutlak yang dapat membimbing kita untuk memukul lumpuh moralitas gaya baru itu. Pegangan itu adalah nilai-nilai moral dalam Qur'an dan Sunnah yang berlaku abadi. Nilai-nilai dari kedua sumber Islam itu bukan saja tidak pernah kering, tetapi juga sama dan sebangun dengan nilai-nilai kemanusiaan adiluhung. Bagi seseorang atau sekelompok manusia atau suatu bangsa yang tetap berpegang teguh pada kedua sumber nilai tersebut, maka moral dan etika situasional,

⁴⁶M. Amien Rais, *Membangun Politik Adiluhung*, Zaman Wacana Mulia, Bandung, 1998, hal. 80-81.

moral dan etika yang bergonta-ganti sesuai dengan nafsu hewaniah bukan merupakan sesuatu yang sulit dikalahkan.⁴⁷

Peran etika dalam bidang politik, sebagai fondasi dasar guna melaksanakan proses kekuasaan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita-cita bersama dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial maupun individual. Sehingga masalah etika atau moral di dalam pembangunan nasional sangat fundamental. Nurcholis Madjid kerap mengatakan bahwa pembangunan nasional kita ini sering kali menunjukkan hal-hal yang berbentuk deviasi atau penyelewengan, bahkan kadang-kadang sudah pengkhianatan. Hal itu terjadi karena tidak dipegangnya paradigma moral atau etis secara cukup. Itulah akar permasalahannya.

Sehingga kita, bila melihat pemberlakuan hukum tidak bisa berjalan, kalau dibedah sebabnya adalah paradigma moral dan etis tidak kukuh. Sehingga hukum, menjadi sangat lemas, mudah dimenggok-menggokkan oleh yang kuat, yang punya uang, yang berpengaruh, dan lain-lain.

Untuk itu, setiap bangsa yang sedang mendorong proses pembangunan nasionalnya, para pemimpinnya harus

⁴⁷M. Amien Rais, *Demi Kepentingan Bangsa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal. 4.

tahu persis paradigma etis atau akhlak yang harus dipegang supaya ada bingkai. Kalau bingkai moral jelas maka tentu para pemimpin, para perancang, dan para penyelenggara negara tidak akan terlalu jauh pergi dari rel atau bingkai moral tadi.

Proses pembangunan nasional merupakan suatu strategi besar dari bangsa kita yang tidak ada tempat atau surut, kita harus terus membangun tidak bisa lain, cuma masalahnya, di dalam menatap masa depan, masalah-masalah paradigma etis, moral dan akhlak perlu kita renungkan sebaik-baiknya.

Dalam kerangka politik, etika demokrasi mengatakan kita boleh beradu argumen dengan lawan politik dan boleh pula kita melancarkan kritik pada hal-hal yang kita anggap kurang wajar. Tetapi setelah keputusan bersama diambil maka secara moral kita terikat dengan keputusan-keputusan itu dan masing-masing kita lantas menjadi non partisan, contoh dalam mensikapi hasil-hasil SU MPR, maupun keputusan Pemerintah lainnya.⁴⁸

Tidak menuntut kemungkinan yang berargumen itu adalah para kiai dan tentu tidak ada halangan bagi mereka untuk berpolitik praktis, karena berpolitik

⁴⁸M. Amien Rais, *suksesi dan Keajaiban Kekuasaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal. 64.

merupakan bagian dari hak-hak demokratik setiap warga negara. Kendatipun demikian, cara atau metode keterlibatan politik para kiai itu dapat dibuat lebih anggun, etis, dan "*aestetis*".⁴⁹

Dalam teori *moral lesson*, yang dikemukakan M. Amien Rais mengatakan bahwa, pertama, seorang muslim harus berani mengatakan tidak pada kebatilan pada segenap manifestasi *Taghut*, dan pada setiap ketidakbenaran. Jadi kalau semangat tauhid merosot, memang lantas keberanian untuk mengatakan tidak juga sama saja, yaitu akan mengalami kemerosotan juga. Padahal, orang muslim adalah orang yang *Walam yaqsyallah*, tidak takut kepada segala sesuatu kecuali kepada Allah.

Kedua, setelah seorang yang bertauhid meniadakan apa-apa yang selain Allah *Famayyakfur bitthaguti*, kemudian beriman sepenuhnya kepada Allah. Yaitu mempunyai *Faith*, keyakinan kepada Allah secara penuh. Dan dengan demikian lantas keyakinan itu menjadi utuh seratus %. Ini karena dia sudah berhasil meniadakan apa-apa yang bukan Allah. Dan ketiga, manusia muslim mempunyai *Proclamation* atau *Declaration of life*, proklamasi atau deklarasi kehidupan yang dituntunkan Al-Qur'an sendiri, yaitu dengan kata-kata *Qul*, katakanlah

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 80.

wahai Muhammad, wahai pemeluk-pemeluk agama Muhammad. Jadi, kita semua disuruh oleh Allah selalu mendeklarasikan diri kita dengan kata-kata *Qul inna shalāti wanusuki wamahyaya wamamati lillāhi rabbil ʿalamin, laā syarikalahu wabidzalika hu mirtu wa ana awwalul muslimin.*

Jadi, ini deklarasi kehidupan orang muslim. Orang muslim mempunyai deklarasi atau proklamasi yang berlaku sepanjang sepanjang hayatnya, yaitu kata-kata, "Sesungguhnya shalatku dan ibadahku, hidupku dan matiku, aku persembahkan semata-mata *lillāhi rabbil ʿalamin*, kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Demikianlah aku perintahkan dan aku ini termasuk orang-orang yang berserah diri."⁵⁰

Teori di atas menggambarkan pada kita akan pentingnya moralitas tauhid dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kehidupan manusia Muslim yang punya tugas tegakkan yang haq dan menyingkirkan kebatilan di tengah perjalanan bangsa ini.

Secara singkat, Al-Qurʿan dan Sunnah Rasulullah Saw. menghendaki setiap Muslim berkehidupan yang utuh, *integral*, dan *intelegated*. Kehidupan dikotomis tidak ada basisnya dalam Islam. Dan seluruh dimensi kehidupan

⁵⁰M. Amien Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, Mizan, Bandung, 1998, hal. 38-39.

tidak ada basisnya dalam Islam. Dan seluruh dimensi kehidupan yang dikembangkan seorang Muslim, apakah masalah hukum, politik, budaya, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan filsafat, dan sebagainya harus bertumpu pada etika dan moral yang tauhid. Artinya, tauhid adalah sumbu kehidupan kita. Dan tauhid jelas menurunkan seperangkat nilai moral dan etika yang jelas, yang dapat menjadi basis bagi pengembangan dan pengelolaan seluruh kehidupan Muslim di dunia modern ini.⁵¹

Dalam konteks agama, menuntut M. Amien Rais, agama memberi paradigma moral dan etik untuk pengelolaan kehidupan konkrit manusia di dunia dalam berbagai bidang. Dan agama selalu menjadi sumber kekuatan moral yang mendorong perlawanan pada ketidak manusiawian, *Sosialisme*, ketidakadilan, *kapitalisme*, *feodalisme*, *Rasionalisme* dan *apartheid* serta *segregasi*. Pada hemat Amien, agama bukan sekedar berurusan dengan hal-hal yang "irrasional", tetapi lebih dari itu agama memberikan kerangka moral dan etis yang selalu menjadi kerangka acuan kehidupan manusia.⁵²

⁵¹ *Ibid.*, hal. 79.

⁵² Arief Budiman dkk, *Mencari Alternatif: Polemik Agama Pasca Ideologi Menjelang Abad 21*, Mizan, Bandung, 1995, hal. 41.

Oleh karena itu, etika akan menjadi sumber kebijakan dalam menentukan strategi ber-politik dan politik akan meneruskan kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai etik. Dan pada akhirnya terciptalah politik adiluhung, anggun dan penuh tanggungjawab.

2. Formulasi Etika Politik Umat Islam sesuai dengan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Etika politik adalah filsafat moral tentang ditemui politik kehidupan manusia. Etika politik mempertanyakan tanggungjawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku dan lain sebagainya.⁵³

Etika politik tidak bertugas mengkhotbahi para politisi atau langsung mempertanyakan legitimasi moral pelbagai keputusan, melainkan agak sebaliknya. Etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk manata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Maka etika politik tidak berada ditingkat sistem legitimasi politik tertentu atau tidak politik dapat membantu usaha masyarakat untuk mengejewantahan ideologi begara yang luhur kedalam

⁵³Franz Magnis-Soseno, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 14.

realitas politik yang nyata.

Keterkaitan dengan da'wah *amar ma'ruf nahi munkar*, etika politik merupakan barometer dalam mensosialisasikannya di tengah kehidupan masyarakat dan negara. Untuk mewujudkan masyarakat yang secara *multi-dimensional harmonis*, sesungguhnya deskripsi yang ditunjukkan Al-Qur'an teramat jelas, dengan jalan menegakkan tugas kembar setiap masyarakat mukmin yaitu *al amru bil ma'ruf nahyu anil munkar*.

Konsep dwi-tunggal *amar Ma'ruf nahi munkar* itu terus Amien Rais gunakan untuk melakukan koreksi mengenai fenomena korupsi, kolusi dan nepotisme yang sudah demikian parah di negeri kita. Begitu juga dengan sikap lantang Amien Rais terhadap persoalan suksesi. Itu semata-mata karena kita ingin menyalurkan hak sejarah dan politik kita. Kita tak ingin sejarah politik, kata Amien, berulang seperti dengan adanya praktek kultus individu pada masa Orde Lama. Kita ingin melukis masa depan bagi bangsa ini.⁵⁴

Dalam Al-Qur'an surat al Luqman ayat 17 menerangkan bahwa:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرِ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ

⁵⁴Takdir Ali Mukti dkk., *Membangun Moralitas Bangsa*, LPPI Umy, Yogyakarta, 1998, hal. XIV.

عَلِّمْنَا مَا أَحْبَبْنَا بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

"Hai anakku, dirinkanlah shalat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah." (Departemen Agama RI. 1989; 655)⁵⁵

Menegakkan salat, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, serta bersifat tabah dalam menghadapi cobaan merupakan perkara-perkara yang besar dan berat (min 'azmil-umur). Semuanya memerlukan kekuatan dan stamina spiritual yang prima demi terlaksananya tugas penting dan strategis itu.

Amar ma'ruf merupakan tawaran konsep dan tatanan sosial yang baik (terkonsepkan secara kongkrit), sebagai solusi baik berupa contoh yang sudah ada maupun masih berupa usulan ketika kita mengadakan nahi munkar, yang merupakan tindakan pencegahan atau penghapusan akan hal-hal yang jelek/salah. Sudah pasti untuk hal-hal tertentu dalam menjalankan *nahi munkar* (atau bahkan juga amar ma'ruf) diperlukan kemauan politik setidaknya dorongan politik, mereka yang mempunyai otoritas (*sultan*, istilah Sayid Qutub). Hal ini ibarat kepastian hukum (*Law enforcement*) terhadap para pelaku kriminal, lebih-lebih kriminal sosial.

Konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dalam bidang hukum adalah gagasan, cita-cita penegakan hukum dan keadilan

⁵⁵Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hal. 655.

serta penanggulangan atau pencegahan kejahatan. penegakan hukum sangat tergantung pada (kemauan politik) penyelenggara negara pada umumnya dan profesi penegak hukum pada khususnya yang terdiri dari Polisi, Jaksa, penasehat hukum dan Hakim.⁵⁶

Reformasi dan Sosialisasi konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam bidang hukum berarti penegakan hukum dalam masyarakat dan negara untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali dan diskriminasi.

Amar ma'ruf nahi munkar merupakan statemen gerakan untuk dijalankan oleh semua golongan umat Islam tanpa kecuali baik laki-laki maupun perempuan, anak buah pimpinan, miskin-kaya, kulit hitam, kulit putih, partikelir-binikrat, buruh-pengusaha, patronclient dan seterusnya. Gerakan *amar ma'ruf nahi munkar* memiliki muatan-muatan penegakan terhadap prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan perlu dijalankan berdasar landasan *sidik amanah, tabligh, fathonah* dan *istiqomah* serta sabar. Gerakan ini hendaknya mampu mengeliminir rasa *riya', sum'ah, ujub, dengki, emosi, nepotisme, nafsu, fasik, munafik, kufur, dan syirik*.

Perbuatan gerakan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan muatan-muatan penegakan dan penerapan prinsip itu,

⁵⁶Takdir Ali Mukti dkk., *Membangun Moralitas Bangsa*, LPPI Umy, Yogyakarta, 1998, hal. 63.

ditujukan sebagai landasan gerak setiap muslim. Semua dijalankan secara global, komprehensif, stimulan dan berkelanjutan serta antara *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai satu kesatuan perjuangan bak dua sisi sekeping mata uang.⁵⁷

Dalam kerangka politik Amien Rais yang seringkali disebut high politik, menyatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah harus lewat pendekatan moral dan etika. Prinsipnya seperti tercantum dalam Al-Qur'an, wama alaina illal balaghul mubin (tiada kewajiban bagimu kecuali menyampaikan seperti apa adanya). Bahwa, kemudian menimbulkan pro-kontra, itu resiko. Kata hikmah mengatakan; kalau engkau sudah yakin dengan sebuah kebenaran, maka jalankanlah, meskipun resikonya banyak orang memuji atau mencela, makanya Amien menyadari hal itu.

Di Indonesia, perjuangan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* (memerintah yang baik dan melarang keburukan) sekaligus, selalu mengundang resiko. Kalau *Amar ma'ruf* itu saja tidak mengandung resiko, tapi mengajarkan *nahi munkar* efeknya cepat atau lambat akan bersinggungan dengan kekuasaan. Memerintah yang baik itu bagus, tanpa resiko. tapi kalau nahi munkar,

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 156.

melarang supaya tidak melakukan yang terlarang atau hal yang buruk, akan berhadapan dengan yang senang melakukannya. Jadi, penuh resiko.

Syarat kemenangan sebuah perjuangan adalah:

- a. Mempunyai keberanian moral, *moral courage*. *Qulil haqqa walau kana murra*. Harus berani secara moral untuk mengatakan yang benar dan yang salah. Di saat orang tidak punya keberanian, maka yang punya keberanian akan diikuti orang.
- b. *Istiqomah, konsisten*.
- c. *Dlear concept*, konsep yang jelas.
- d. *Mass support*, memperoleh dukungan massa yang real. Perjuangan menegakkan kebenaran tidak bisa tanpa dukungan rakyat atau tanpa terciptanya kebersamaan.
- e. Dan visi ke depan yang jelas.⁵⁸

Dakwah merupakan rekonstruksi masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Semua bidang kehidupan dapat dijadikan arena dakwah, dan seluruh kegiatan hidup manusia bisa digunakan sebagai sarana atau alat dakwah. Kegiatan politik, sebagaimana kegiatan ekonomi, usaha-usaha sosial, gerakan-gerakan budaya, kegiatan-kegiatan ilmu dan teknologi, kreasi seni, kodifikasi hukum dan

⁵⁸M. Amien Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, Mizan, Bandung, 1998, hal. 98.

lain sebagainya, bagi seorang Muslim seharusnya memang menjadi alat dakwah.

Politik dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Tetapi bagaimanapun ia definisikan, satu hal yang sudah pasti, bahwa politik menyangkut kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan. Disamping itu dalam pengertian sehari-hari, politik juga berhubungan dengan cara dan proses pemerintahan suatu negara. Oleh karena itu, politik merupakan salah satu kegiatan penting, mengingat bahwa suatu masyarakat hanya bisa hidup secara teratur kalau ia hidup dan tinggal dalam sebuah negara dengan segala perangkat kekuasaannya. Sedemikian pentingnya peranan politik sangat menentukan corak sosial, ekonomi, budaya, hukum dan berbagai aspek kehidupan lainnya.⁵⁹

Karena politik adalah alat dakwah, maka aturan permainan yang mesti ditaati juga harus paralel dengan aturan permainan dakwah. Misalnya, tidak boleh menggunakan paksaan atau kekerasan, tidak boleh menyesatkan, tidak boleh menjungkirkan kebenaran, dan juga tidak diizinkan menggunakan induksi-induksi psikotropik yang mengelabui masyarakat. Selain itu, keterbukaan, kejujuran, rasa tanggungjawab, serta keberanian menyatakan yang besar sebagai benar dan yang

⁵⁹M. Amien Rais, *Cakrawala Islam, Antara Cita dan Fakta*, Mizan, Bandung, 1997, hal. 27.

batil sebagai batil, harus menjadi ciri-ciri politik berfungsi sebagai sarana dakwah.

Politik yang memiliki ciri-ciri tersebut niscaya fungsional terhadap tujuan dakwah. Sebaliknya, bila aturan permainan dalam politik tidak jelas atau sejalan dengan aturan permainan dalam dakwah pada umumnya, maka mudah diperkirakan bahwa politik semacam itu akan isfungsional terhadap dakwah. Namun jangan lupa bahwa aturan-aturan permainan itu sesungguhnya hanya refleksi dari moralitas dan etika yang lebih dalam. Moralitas dan etika kegiatan dakwah dalam bidang apapun harus bersumber pada tauhid, sehingga moralitas dan etika politisi Islam juga bersandar dari politik, maka politik itu akan berjalan tanpa arah, dan bermuara pada kesengsaraan orang banyak.⁶⁰

Sesungguhnya umat Islam diharapkan menempati posisi pemimpin sehingga upaya menegakkan keadilan dan berantas kedzaliman menjadi mudah dilakukan. Kalau dalam kenyataan orang yang dzalim dan sistem yang dzalim bisa berkuasa dan memimpin ini merupakan kesalahan orang Mukmin sendiri. Sementara kita dalam *level global* dan nasional masih belum memimpin tugas menegakkan keadilan dan memberantas kedzaliman tetap harus dilakukan. Itulah

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 28.

makna dari *amar ma'ruf nahi munkar*. tentunya dalam beramar ma'ruf nahi munkar kita berfikir, bertindak strategis dan taktis dengan mempelajari medan atau keadaan yang dihadapi.

Dalam kaitan ini kita perlu mempelajari nilai historis yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya kenapa kisah yang sering diungkapkan dalam Al-Qur'an adalah kisah perjuangan Nabi Musa dan Harun melawan Fir'aun. Pasti ada hikmah dan pelajaran moral dibalik kisah perjuangan ini.⁶¹

Ternyata kalau dikaji maka Fir'aun sebagai simbol kekuasaan yang dzalim, atau pengendali sistem yang dzalim berdasarkan koalisi empat elite. Yaitu elite politik militer, Fir'aun sendiri, ia dibantu teknokrat bernama Hamam, elite penguasa Qarun dan elite agama bernama Bal'am, Mereka berkoalisi mempertahankan kehidupan yang *eksploitatif/diskriminatif*, dimana unsur ketidakadilan selalu ada.

Lantas apa yang harus kita perbuat menghadapi sistem yang dzalim itu? *Amar ma'ruf nahi munkar* terus digalakkan dengan memahami zaman teknokrat seperti sekarang. Artinya, kekuatan penelitian dan pengembangan, kekuatan komunikasi, ilmu dan teknologi serta kekuatan ekonomi harus direbut oleh umat Islam.

⁶¹M. Amien Rais, *Demi Kepentingan Bangsa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal. 10.

Setiap perubahan tentulah berhadapan dengan kedzaliman. Dan menjadi tugas setiap Muslim yang beriman untuk membangun kekuatan (power) untuk mengimbangi keadzaliman. tentu saja upaya ini harus disesuaikan dengan keadaan yang ada.⁶²

Oleh karena itu, konsep dakwah bil hikmah itu pendekatannya *komprensip, integral*, dan strategis dalam kiprah politik. Politik adalah alat dakwah (*amar ma'ruf nahi munkar*).⁶³ Dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar termasuk kewajiban (kefarduan) yang harus dilaksanakan setiap muslim untuk menyelamatkan masyarakat muslim dari berbagai bencana, penyakit dan kemaksiatan yang akan menghancurkan kehidupan umat Islam dan akan membunuh sendi-sendinya, serta pada puncaknya akan melenyapkan Islam dan pemeluknya.⁶⁴

C. Politik Perspektif M. Amien Rais

1. Peran Islam dalam Negara

Pengertian Islam sebagai sikap pasrah kepada Allah SWT. menjadikan agama Islam, menurut Al-Qur'an

⁶²Media Dakwah, *Reformasi Akhir Tirani Minoritas*, Edisi No. 287, Mei, 1998.

⁶³Muhammad Njib, *Suara Amien Rais Suara Rakyat*, Gema Insani Press, Jakarta, 1998, hal. 119.

⁶⁴Virgina Held, *Etika Moral: Pembeneran Tindakan Sosial*, Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 653.

sudah ada sebelum Nabi Muhammad Saw. Ketika Nabi Adam diutus ke dunia, agama Islamlah yang dibawanya. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada seluruh umat manusia melalui perantaraan Rasul pilihan-Nya, Nabi Muhammad Saw. Ajaran ini bukan sama sekali baru tetapi merupakan kelanjutan dan penyempurnaan agama-agama yang dibawa para Rasul sebelumnya.

Islam menolak sekularisme sebab ajaran Islam mencakup seluruh bidang kehidupan manusia termasuk bidang kenegaraan. Dalam Islam tidak ada pemisahan antar urusan agama dan politik. Pengertiannya, politik sebagai suatu kegiatan harus dilakukan dalam kerangka sistem nilai Islam. Namun demikian, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah tidak membatasi pengaturan kenegaraan tersebut secara kaku. Hal tersebut diserahkan kepada umat-Nya melalui ijtihad.

Teori negara dalam sejarah bisa muncul dari tiga jurusan:

- a. Bersumber pada teori khilafah yang dipraktekkan sesudah Rasulullah wafat, terutama biasanya dirujuk pada masa Khulafaur Rasyidin.
- b. Bersumber pada teori imamah dalam paham Islam Syi'ah.
- c. Bersumber pada teori imamah atau pemerintahan.⁶⁵

⁶⁵Abdul Aziz Thoha, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal. 39-42.

Karena Islam adalah satu sistem hidup yang mengatur segala kehidupan dan penghidupan manusia di dalam pelbagai hubungan, maka agama tidak dapat dipisahkan dari negara, negara tidak dapat dilepaskan dari agama. Karena itu "sekularisasi dalam politik kenegaraan" tidak dikenal dalam Islam, karena tidak sesuai dengan fitrah al-Islam sebagai kebulatan ajaran.

Dan negara sendiri merupakan organisasi (organ, badan, atau alat) bangsa, untuk mencapai tujuannya. Jadi negara itu bukanlah tujuan melainkan alat, lebih-lebih bagi setiap muslimin. Bagi setiap muslim negara adalah alat untuk merealisasikan Abdi Allah dan mengaktualisasikan fungsinya sebagai khalifah Allah, untuk mencapai keridlaan Allah, kesejahteraan duniawi dan ukhrawi, serta menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam lingkungannya.⁶⁶

Dalam istilah lain, Islam adalah agama yang teduh, yang mengayomi seluruh umat manusia tanpa kecuali. Justru di bawah naungan Islam, manusia dapat hidup dengan aman dan damai.⁶⁷

⁶⁶Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam dan Umatnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, 156-157.

⁶⁷M. Amien Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, Mizan, Bandung, 1997, hal. 39.

Islam sebagai agama wahyu, bagi setiap Muslim menjadi acuan paripurna untuk seluruh kehidupannya, tegas Amien Rais.⁶⁸ Dan kalimat tauhid yang berhubunyi *lā ilaha ila Allah* (tidak ada Tuhan selain Allah) merupakan esensi dari seluruh ajaran Islam.

Yang penting, cara bertutur umat Islam yang makin eksklusif lagi. Pada saat yang sama, umat Islam harus bisa mengayomi dan memayungi umat yang lain.

Kemudian, ancaman masa depan adalah kompetisi sumber daya manusia dalam pertarungan ekonomi yang makin terbuka. Supaya bangsa ini tidak menjadi kuli di negaranya sendiri, umat Islam harus melibatkan diri dalam pembangunan sumber daya insani.⁶⁹

Prinsip dasar Islam tentang pengaturan kehidupan publik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*siyasaḥ ad-dunya*) adalah mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan rakyat secara umum (*al-maslahah al-ammah*). Tujuan substantif-universal disyariatkannya hukum-hukum agama adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan dunia maupun kehidupan pasca dunia.

Kemaslahatan itu utamanya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi:

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 50.

⁶⁹ M. Amien Rais, *Membangun Politik Adiluhung*, Zaman Wacana Mulia, Bandung, 1997, hal. 313.

- a. Hak dan fisik atau jiwa, (*hifz ad-din*).
- b. Keselamatan fisik atau jiwa, (*hifz an-nafs*).
- c. Keselamatan keluarga atau keturunan, (*hifz an-nasl*).
- d. Keselamatan harta benda atau hak milik pribadi (*hifz-al-mal*).
- e. Dan keselamatan akal atau kebebasan berfikir (*hifz al-'aql*).⁷⁰

Paradigma pemikiran Amien Rais yang berpusat pada konsep tauhid mengandung implikasi teoritis bahwa seluruh dimensi kehidupan umat Islam harus bertumpu pada tauhid sebagai esensi dari seluruh ajaran Islam. Hanya dengan menumpukan seluruh aktivitas kegiatan hidup pada tauhid, umat Islam dapat mencapai suatu kesatuan monoteisme (*monotheistic unity*) yang meliputi semua bidang dan kegiatan hidup, termasuk di dalamnya kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Menurut Amien Rais:

Jika seorang Muslim masih beranggapan bahwa Islam hanya berperan sebagai petunjuk yang berlaku dalam urusan-urusan ruhaniah, sedangkan untuk urusan dunia ia mencampakkan Islam dan menggantinya dengan sistem berfikir atau sistem sosial yang tanpa arah, maka ia adalah seorang Muslim sekularis (*'ilmani*).⁷¹

⁷⁰ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal. 13.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 98.

Disamping itu, Amien Rais mengajukan tiga fundamental yang harus ditegakkan untuk membangun suatu negara atau masyarakat. Pertama, negara harus dibangun di atas dasar keadilan (*al-'adalah*). Pendirian suatu negara harus bertujuan untuk melaksanakan keadilan dalam arti seluas-luasnya, tidak sebatas pada keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial ekonomi. Keadilan hukum yang menjamin persamaan hak setiap orang di muka hukum belumlah cukup, karena tanpa keadilan sosial ekonomi, masih dapat timbul ketimpangan-ketimpangan tajam diantara kelompok-kelompok masyarakat.

Kedua, negara harus dibangun dan dikembangkan dalam mekanisme musyawarah (*syura*). Prinsip ini menentang elitisme yang menganjurkan bahwa hanya para pemimpin (elite) sajalah yang paling tahu cara mengurus dan mengelola negara, sedangkan rakyat tidak lebih dari domba-domba yang harus mengikuti elit. Menurut Amien Rais, musyawarah merupakan pagar pencegah bagi kemungkinan munculnya penyelewengan negara kearah *otoritarianisme, despotisme, diktatorisme* dan berbagai sistem lain yang cenderung membunuh hak-hak politik rakyat.

Dan ketiga, dalam sebuah negara prinsip persamaan (*al-musawah*) harus ditegakkan. Islam sebagaimana agama samawi lainnya (Yahudi, Kristen), tidak pernah

membedakan manusia berdasarkan beda jenis kelamin (*sex*), warnakulit (*race*), status sosial (*class*), suku bangsa (*nationality*) dan agama (*religion*). Menurut ajaran dan tradisi ketiga agama tersebut, semua manusia berkedudukan sama di depan Tuhan (*all men are equal before God*).

Tiga fundamentalis Islam bagi pengaturan masyarakat dan negara seperti tersebut di atas harus ditegakkan. Penegakan fundamentals itu sendiri baru bisa berjalan efektif jika ada mekanisme politik *check and balance* atau dalam bahasa Al-Qur'an sering disebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar.⁷²

Umat Islam, baik dalam posisi mayoritas maupun minoritas, semua berada di bawah *yuridis nation state*. Dalam hal ini, kita tidak lantas harus menolak negara dan bangsa dimana kita berada. Ini adalah sikap yang sangat picik dan utopis. Allah SWT sendiri tidak pernah membebani kita tanggungjawab selain yang sesuai dengan kemampuan kita.

Kaum Muslimin sekarang ini belum mampu menghapuskan kenyataan adanya negara-bangsa untuk kemudian membentuk masyarakat Islam ideal seperti dikatakan Hasan al banna tersebut. Kita tidak boleh

⁷²*Ibid.*, hal. 107.

menutup mata terhadap kenyataan sistem internasional kontemporer. Tetapi, marilah kita ingat bahwa sesungguhnya hubungan sesama muslim itu, walaupun berbeda latar belakang nasional, tetap diikat oleh ukhuwah Islamiyah universal.⁷³

Dalam pada itu, Amien Rais tidak menemukan suatu perintah dalam Al-Qur'an maupun al Hadits agar kita mendirikan daulah Islamiyah atau negara Islam. Akan tetapi justru disinilah letak keabadian Wahyu Allah. Jika misalnya ada perintah tegas untuk mendirikan negara Islam, maka Al-Qur'an dan al-Hadits juga akan memberikan tuntunan terperinci tentang struktur dari institusi-institusi negara yang dimaksudkan, sistem perwakilan rakyat, hubungan antar badan-badan *legislatif*, *eksekutif* dan *Yudikatif*. Sistem pemilihan umum (apakah dengan *desrik* atau sistem *proporsional*) dan detil-detil lain yang benar-benar terperinci.⁷⁴

Dan berdasarkan pengalaman sejarah, kepemimpinan kolektif, bukan kepemimpinan satu orang, yang merepresentasikan seluruh golongan di dalam umat Islam

⁷³Nurcholis Madjid dkk., *Satu Islam Sebuah Dilema*, Mizan, Bandung, 1992, hal. 168.

⁷⁴Salim Azzam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, Mizan, Bandung, 1983, hal. 24.

lebih punya masa lampau, khususnya di Indonesia, mengingat heterogenitasnya di negeri ini. Menurut Amien Rais, langkah pertama di dalam membangun kepemimpinan kolektif seperti ini adalah menggambarkan kekuatan intelektual Muslim di Indonesia yang memang betul-betul representatif. Artinya berbagai kelompok dalam tubuh umat itu memang benar-benar terwakili.

Sekali lagi Amien Rais menegaskan bahwa, "*Islamic State*" atau negara Islam tidak ada dalam Al-Qur'an maupun dalam al Sunnah. Oleh karena itu, tidak ada perintah dalam Islam untuk menegakkan negara Islam. Yang lebih penting adalah selama suatu negara menjalankan etos Islam, kemudian menegakkan keadilan sosial dan menciptakan suatu masyarakat yang *egalitarian*, yang jauh dari *eksploitasi* manusia atau manusia maupun eksploitasi golongan atas golongan lain, berarti menurut Islam sudah dipandang negara yang baik.⁷⁵

Bagi muslimin Indonesia, akan sudah berbahagia kalau Pancasila yang indah itu benar-benar dipraktekkan secara konsisten. Dengan demikian sudah berarti sebagian ajaran Islam dijalankan. Namun ada catatan bahwa sebuah

⁷⁵Ahmad Bahar, *Biografi Cendekiawan Politik, Gagasan dan Pemikiran Menggapai Masa Depan Indonesia Baru*, Pena Cendekia, Yogyakarta, 1988, hal. 58.

negara harus menegakkan etos atau sendi-sendi Islam mesti ditempuh dan diupayakan.

Muhammad Saw. bukan saja nabi dan utusan Allah, akan tetapi ia juga seorang suami, seorang bapak, seorang negarawan, seorang jenderal, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Oleh karena ajaran-ajaran Islam yang dibawa Nabi Saw. lewat Al-Qur'an dan Sunnah menyangkut semua kehidupan manusia, maka usaha untuk memisahkan agama Islam dari kehidupan publik adalah sia-sia dan mustahil dapat berhasil dilingkungan masyarakat Islam. Pendek kata segmentasi agama dari arus kehidupan masyarakat tidak mempunyai dasar dalam Islam. Sehingga, yang jelas Islam tidak pernah menentukan bentuk negara yang harus dibangun kaum muslimin. Bagi Islam, yang lebih penting adalah Substansi atau isi.⁷⁶

2. Politik Berdimensi Etik

Kata politik berasal dari kata politic (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely, will judged, Prudent*. Kata ini diambil dari kata latin *politicus* dan bahasa Yunani (*Greek*) *Politicus* yang

⁷⁶John J. Donohue dan John I. Esposito, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995: XXIV.

berarti *relating to a citizen*. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* (kota). Politik kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tiga arti, yaitu:

Segala urusan dan tindakan (kebijakan), siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintah sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan dan juga di pergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.⁷⁷

Menurut Delier Noer, politik adalah

.... Segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa hakikat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas atau sikap yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan.

Politik dalam konteks normatif, merupakan bentuk asosiasi manusia dalam rangka mencapai kebaikan bersama (*public good*) menjadi bagian terpenting dalam kehidupan. dapat dikatakan, dapat dikatakan, sejarah manusia berawal dari kegiatan yang bercorak politis.⁷⁸

⁷⁷Abdul Mu'in Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 34.

⁷⁸Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralitas Budaya dan Politik*, SI-Press, Yogyakarta, 1999, hal. 37.

Politik pada dasarnya berarti seni untuk memecahkan konflik dan membagi kekuasaan (power sharing).⁷⁹ Ada tiga pola interaksi sistim politik baik lokal, nasional, regional maupun internasional yang dapat kita temukan yaitu; pertama, interaksi kompetitif, dimana pencapaian tujuan oleh satu aktor politik tidak berjalan sejajar dengan tujuan aktor-aktor politik lainnya. Kedua, intraksi kooperatif, dimana pencapaian tujuan di permudah dengan usah kerja sama dan saling melengkapi antara berbagai aktor politik. Ketiga, interaksi kompetitif-kooperatif dimana para aktor politik mengejar tujuan ganda, sebagai tujuan tidak sejalan menimbulkan ketegangan, sedangkan sebagai tujuan lainnya sama sehingga dapat dicapai dengan kerja sama dan usaha saling melengkapi.⁸⁰

Menurut tinjauan Islam ada dua jenis politik, yaitu politik politik kualitas-tinggi (high politics) dan politik kualitas rendah (low politics). Pertama, high politics mempunyai tiga ciri yang harus dimiliki, yaitu:

- a. Setiap jabatan politik pada hakekatnya merupakan amanah dari masyarakat, yang harus dipelihara sebaik-

⁷⁹M. Amien Rais, *Suksesi Keajaiban Kekuasaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal. 33.

⁸⁰M. Amien Rais, *Politik Internasional Dewasa Ini*, Usaha Nasional, Surabaya, 1989, hal. 73-74.

baiknya. Amanah itu tidak boleh disalahgunakan, misalnya untuk memperkaya diri sendiri atau menguntungkan golongannya saja dan menelantarkan kepentingan umum. Kekuasaan harus dipandang sebagai nikmat yang dikaruniakan oleh Allah untuk mengayomi masyarakat, menegakkan keadilan, dan memelihara orde atau tertib sosial yang egalitarian. Kekuasaan, betapapun kecilnya harus dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan bersama, sesuai dengan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat luas. setiap orang sesungguhnya memiliki kekuasaan tertentu, entah ia duduk dilembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, atau bahkan dalam kelompok-penekan (*pressure group*), ataupun memegang posisi kunci dalam suatu organisasi. Khususnya tersebut tidak boleh dipisahkan dari amanah yang harus terus mengarahkan penggunaan kekuasaan itu.

- b. Erat dengan yang pertama, setiap jabatan politik mengandung pertanggungjawaban (*mas'uliyah, accountability*). Sebagaimana diajarkan oleh Nabi, setiap orang pada dasarnya pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan kepentingannya atau tugas-tugasnya. Kesadaran akan tanggungjawab ini sangat menentukan penyelenggaraan politik kualitas-tinggi.
- c. Kegiatan politik harus dikaitkan secara ketat dengan

prinsip ukhuwah (*brotherhood*), yakni persamaan diantara umat manusia.⁸¹

Politik kualitas-tinggi dengan ciri-ciri minimal tersebut sangat kondusif bagi pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*. Agaknya inilah antara lain yang dimaksud oleh Al-Qur'an surat al-Hajj ayat 41 yaitu:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْعُرْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَامِلٌ الْأُمُورِ

"(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan."⁸²

Dalam politik kualitas-rendah, Amien Rais memberikan konotasi dengan "*politik Machiavella*" yang tidak sehat, penuh *hipokrisi*, kelicikan dan sebagainya. Adapun ciri yang tersohor dalam politik tersebut adalah: Pertama, Machiavelli mengajarkan bahwa kekerasan (*violence*)-brutalitas dan kekejaman merupakan cara-cara yang seringkali perlu diambil penguasa. Kedua,

⁸¹M. Amien Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, Mizan, Bandung, 1997, hal. 31.

⁸²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1984, hal. 518.

penaklukan total atas musuh-musuh politik dinilai sebagai kebajikan-puncak.

Musuh tidak boleh diberi kesempatan untuk bangkit, bahkan kalau perlu diperlukan sebagai barang, bukan sebagai manusia Politik semacam ini, yang berintikan pada perjuangan untuk merebut kekuasaan (*struggle for power*) dan menguasai pemerintah, biasanya disebabkan oleh nafsu-nafsu manusia yang tidak mengenal batas. Konsep ukhuwah (persaudaraan diantara umat manusia) tidak sedikit pun terlintas dalam benak Machiavelli. Dan ketiga, dalam menjalankan kehidupan politik seorang penguasa harus dapat bermain seperti binatang buas terutama seperti singa dan sekaligus sebagai anjing pemburu.

Politik kualitas-rendah tersebut mudah diserap, karena naluri-naluri dan nafsu-nafsu manusia ditampung secara luas. Politik kualitas rendah dapat terjadi dikalangan umat, antara lain karena politik belum didekati secara profesional, dan kebanyakan pelaku politik mungkin belum bersedia menggunakan moralitas dan etika Al-Qur'an dengan konsekwen. Di samping itu, situasi umum memegang mencerminkan berlakunya politik kualitas rendah tersebut, sehingga orang lebih mudah berenang mengikuti arus daripada melawan arus.

High Politics adalah politik yang luhur, adiluhung dan berdimensi moral etis, politik amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan politik praktis (*low politics*) yang kata Amien, cenderung nista, berebut kursi dan mencari serpihan kekuasaan. Jadi, kalau dia meneriakkan suksesi, demokratisasi dan dialog nasional, maksudnya tidak lebih sebatas mengingatkan.⁸³ Namun walaupun demikian politik tingkat rendah ada yang tetap berpedoman dengan akhlakul karimah.⁸⁴

Gagasan *high politics* Amien Rais ini pada dasarnya ingin melandasi setiap aktifitas yang bernuansa politik dengan etika pemahaman keagamaan yang luhur itu. Dengan demikian Amien mencoba menggabungkan nilai-nilai keagamaan dengan praktek kehidupan secara nyata.⁸⁵

Dalam bidang politik dan sosial, kita sedang menyaksikan gempa bumi politik yang bersumber dari tekanan energi bangsa kita yang selama ini terpendam, tertindas, dan terbandung oleh Orde Baru, Pendekatan stabilitas yang diterapkan *at any cost* sehingga

⁸³Muhammad Najib dkk., *Suara Amien Rais Suara Rakyat*, Gema Insani, Jakarta, 1998, hal. 104.

⁸⁴M. Amien Rais, *Membangun Politik Adiluhung*, Zaman Wacana Mulia, Bandung, 1997, hal. 149.

⁸⁵Ahad Bahar, *Biografi Cendekiawan Politik Amien Rais, Gagasan dan Pemikiran Menggapai Masa Depan Indonesia Baru*, Pena Cendekia, Yogyakarta, 1998, hal. 31.

mengebiri peran serta masyarakat telah menciptakan berbagai ketidakselarasan dan keresahan. Selama ini, energi partisipasi tersebut tertekan, dan ketidakselarasan maupun keresahan menjadi sesuatu yang laten. Tetapi, begitu Orde Baru gulung tikar, semuanya meledak dalam bentuk berbagai besar baru dan sebagian lainnya lama, tetapi mengalami metamorfosis setelah kondisi reformasi tercipta.⁸⁶

Karenanya, kita perlu bersama-sama memikirkan aturan-aturan main yang menjadi rujukan bersama-sama semua pemain politik di pentas politik Indonesia. Kuncinya adalah menghindari cara-cara otoriter lama yang gampang mengintervensi organisasi politik dan kemasyarakatan sehingga kapasitas dan efektifitas partisipasi masyarakat menjadi lumpuh. Dilain pihak, kita memerlukan situasi yang memungkinkan kekuatan-kekuatan bangsa secara bersama-sama melanjutkan proses reformasi menuju cita-cita bersama. Inilah pentingnya tugas nasional membina tatanan konstitusional yang akan mengawal dan mewasiti proses reformasi selanjutnya.⁸⁷

Arti penting tatanan konstitusional akan semakin kelihatan apabila kita belajar dari pengalaman negara-

⁸⁶Muhammad Najib dkk., *Amien Rais Sang Demokrat*, Gema Insani Press, Jakarta, 1998, hal. 115.

⁸⁷*Ibid.*, hal. 117.

negara lain yang mengalami transisi dari sistem yang otoriter menuju tatanan yang demokratis.

Aspek konstitusional dari proses pergantian kepemimpinan perlu juga diluruskan secara terbuka, sebab bagaimanapun berbagai pandangan yang pro dan kontra, kita harus ingat dan sadar bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum "dan bukan negara kekuasaan". Itulah sebabnya adalah tidak benar, kalau ada pandangan dari beberapa pihak atau oknum, bahwa entah demi apa, konstitusionalitas dari proses pergantian itu seolah-olah tidak perlu dipersoalkan lagi.⁸⁸

Jika dicermati secara seksama, kiranya tak ada yang perlu dikhawatirkan dari langkah-langkah politik Amien Rais. Ada alur logika yang bisa menjelaskan perilaku politik (kini) mantan Ketua PP Muhammadiyah itu.

Pertama, benar bahwa pada hakekatnya Amien Rais adalah tokoh cendekiawan yang berusaha menghindarkan diri dari interes-teres pribadi dan kepentingan politik sesaat. Dalam berbagai kesempatan dia kerap berujar, *I have nothing to lose*. Karenanya ia memiliki *self confident* yang tinggi. Karena itu pula ia mengintroduksi istilah, *high politics*, politik tinggi,

⁸⁸ Al-Chaidar, *Reformasi Prematur: Jawaban Islam Terhadap reformasi Total*, Darul Fatah, Jakarta, 1999, hal. 161.

politik adiluhung.

Kedua, aktualisasi dari *high politics* Amien Rais, sebagai implementasi dari pesan profetik nahi munkar, meniscayakan dirinya untuk terus melakukan koreksi total terhadap berbagai ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat, terutama yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahkan ia tak segan-segan menganjurkan pergantian kepemimpinan nasional (suksesi). Suksesi baginya suatu keharusan, karena tanpa suksesi keberhasilan reformasi diberbagai bidang akan terus terhambat karena yang memegang kendali justru orang yang anti reformasi.

Logika ini pulalah yang kemudian dipakai oleh orang-orang yang menginginkan Amien Rais agar benar-benar siap menjadi Presiden. Kalau cuma ngritik semua orang bisa buktikan kalau anda benar-benar bisa, demikian kata mereka. Selain itu Amien juga sering "ditantang" untuk jangka main-main dengan soal pencalonan dirinya menjadi presiden. Prof. Dr Maswadi Rauf bahkan pernah mengatakan pada Amien Rais untuk jangan sekali-kali bicara tentang pencalonan dirinya menjadi presiden jika tidak sungguh-sungguh, karena hanya akan mengecewakan para pendukungnya. "Ancaman" senada juga pernah dilontarkan Ratna Sarumpaet, aktifis perempuan yang menggagas dan mengetahui SIAGA

(Solidaritas Indonesia untuk Amien-Mega). Menanggapi "desakan-desakan" itu dengan rileks Amien mengatakan "Sebetulnya, tidak terlintas di benak saya, kalau dipanas-panasi, saya jadi penasaran, bagaimana sih rasanya jadi presiden.

Ketiga, harapan orang pada Amien Rais tentu bukan sekedar iseng. Dan Amien Rais pun, meskipun terkesan rileks, tentu punya tanggungjawab moral untuk membenarkan secara historis semua apa yang telah dilontarkan, kecuali kalau Amien Rais telah berubah haluan, dari reformis tulen ke badut politik.

Satu hal yang meniscayakan Amien Rais menjadi Presiden, disamping dia memang dituntut untuk tidak sekedar mgomong. Tapi juga program reformasi yang telah digulirkannya bersama-sama mahasiswa harus dipertanggungjawabkan. Tidak sekedar hit and run, atau tinggal glanggang colong playu.

Agar tidak terbengkalai, program reformasi harus ditindak lanjuti dengan tanpilnya tokoh reformasi tulen menjadi pemimpin bangsa (presiden), karena relatif sulit mencari tokoh yang benar-benar reformis untuk siap menjadi calon presiden, maka Amien Rais harus berani tampil. Tentu bukan karena logika "tiada rotan akar pun jadi" meskipun Amien Rais sendiri mengistilahkan kesiapannya menjadi calon presiden itu sebagai *fardlu*

kifayah (kewajiban kolektif yang bisa terpenuhi meskipun hanya diwakili satu orang).

Di samping itu, sebagai tokoh yang sudah diklaim sebagai demokrat, dijadikan judul buku terbitan Gema Insani Press (1998), Amien Rais juga dituntut untuk membuktikan dirinya benar-benar sebagai demokrat sejati. Tanpa pernah menjadi presiden, kadar kedemokratan Amien bisa jadi hanya sebagai tingkat elementary atau beginner. Untuk menjadi demokrat sejati yang tidak sebatas retorika dan klaim sepihak, Amien pun tampaknya tidak ragu lagi untuk menjadi pemimpin partai dan sekaligus menjadi salah seorang calon presiden RI.

Maka dalam suatu kesempatan Amien Rais memberikan ulasan bahwa, kursi presiden bukanlah sesuatu yang sangat istimewa, artinya kursi tersebut dapat ditempati oleh siapa saja asal memiliki kualifikasi yang pas.⁸⁹ Sehingga tuduhan bahwa Amien Rais telah memasuki kancah *low politics* yang cenderung nista sebenarnya masih longgar untuk diperdebatkan. Pada suatu kesempatan dialog terbuka di Tangerang beberapa waktu lalu, menjawab salah seorang hadirin yang bertanya pada Amien Rais, menegaskan bahwa istilah *high politics* dan *low politics* adalah ciptaan dirinya sendiri, oleh karenanya

⁸⁹Sutipyo R. dan Asnawi, *PAN: Titian Amien Rais Menuju Istana*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1999, hal. 19.

ia punya kewenangan untuk menerjemahkan sebatas mana kedua istilah itu bisa diterapkan. Karena ia mengetahui batasan-batasan itu, maka ia sendiri begitu yakin bahwa langkah-langkahnya selama ini masih dalam koridor high politics. Niatnya untuk menjadi presiden adalah karena tanggungjawab moral untuk menuntaskan program reformasi, bukan kepentingan pribadi.⁹⁰

Dalam sebuah media massa yang dimuat tanggal 05 Oktober 1997, dikutip dalam buku *Hot Issue* menyatakan bahwa, "saya tidak merasa dijebak oleh Permadi. Insya Allah feeling saya cukup tajam. Saya punya khittah dan visi sendiri dalam masalah ini. Jadi, tak ada yang bisa jebak saya. Tak ada istilah itu, yang saya inginkan adalah adanya koalisi besar yang bersih. Itu saja, oleh karena itu, saya tidak pernah takut terhadap implikasi saya menyatakan kesediaan jadi capres itu. Saya hanya takut kepada Allah dan Ibu saya. Kalau dengan yang lain, saya merasa biasa saja". Thohari pernah melontarkan gagasan bahwa high politics yang dilontarkan Amien Rais butuh kaki agar membumi dan tidak mengawang. "Kalau *high politics* itu diibaratkan masakan, maka ia butuh koki," kata Hijriyanto. Artinya, para praktisi politik yang duduk di birokrasi dan atau dilembaga legislatif

⁹⁰ Abd. Rohim Ghazali, *M. Amien Rais Dalam Sorotan Generasi Muda Muhammadiyah*, Mizan, Bandung, 1998, hal. 64.

sepanjang memperjuangkan demokrasi, keadilan, dan nilai-nilai moral lainnya, maka ia masih berada dalam koridor *high politics*. Karenanya mungkin, kini Amien Rais ingin menjadi kaki atau koki atas *high politics* yang digagasnya sendiri.

Maka, Secara sederhana, bahasa Amien Rais merupakan bahasa atau term-term politik yang bermakna (meaning), berargumen (*reason*), dan memiliki kekuatan kritik Islam, misalnya doktrin normatif Islam tentang (term) tauhid. Intinya, pengakuan "tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah urusan Allah."⁹¹ Doktrin normatif ini oleh Amien Rais justru direkonstruksi secara kreatif dan konsepsional sebagai "sumber perjuangan Muhammadiyah khususnya dan umat Islam umumnya" dalam menegakkan keadilan sosial.

Benang merah Al-Qur'an itu keadilan, futur Amien. Maka, tauhid sebagai bentuk bahasa (politik) Islam, diartikulasikan kedalam bahasa politik Amien Rais sebagai "tauhid sosial" yang efektif sebagai kekuatan kritik terhadap kesenjangan sosial. Jadi secara teologis, ada "legitimasi ke-Tuhanan" untuk menggempur ketimpangan sosial.

⁹¹Muhammad Najib, Himmati K.S., *Amien Rais Dari Yogyakarta ke Bina Graha*, Gema Insani, Jakarta, 1999, hal. 101.

Demikian pula term lain dari bahasa politik Amien Rais, seperti term *amar ma'ruf* nahi munkar, seperti dalam surat Ali Imran ayat 104;

وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung". (Departemen Agama RI., 1989; 93)⁹²

Doktrin normatif (bahas politik) Islam ini diartikulasikan Amien kedalam bahasa politiknya "*sparing partner*" atau sesuai bahasa politik Emil Salim sebagai "pengkritik dan penyeimbang terhadap pemerintah", atau suara oposisi harus dibudayakan (Istilah Nurcholis MadjidI dan didengar (istilah Adnan Buyung Nasution). Akan tetapi semua bahasa politik itu tetap berbingkai dalam sebuah wacana kritisisme" bahasa seorang Amien Rais, yang selalu mengomfirmasikan pada kebaikan dan menegaskan terhadap kemungkaran, ketika berhadapan dengan siapa pun, terutama penguasa.

⁹²Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989, hal. 93.